

Judul : Larangan pakai AI instan, biar siswa tak malas berpikir
Tanggal : Selasa, 17 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Larangan Pakai AI Instan Biar Siswa Tak Malas Berpikir

FOTO: IG PRIBADI



Lalu Hadrian

WAKIL Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendukung pelarangan siswa SD hingga SMA menggunakan Artificial Intelligence (AI) instan seperti ChatGPT. Langkah itu dinilai penting agar kemampuan bernalar dan logika siswa di tingkat pendidikan dasar hingga menengah tetap berkembang secara optimal.

Menurut Lalu, tujuan utama kebijakan tersebut adalah mencegah siswa bergantung pada teknologi yang memberikan jawaban instan. Pasalnya, fokus pendidikan dasar harus berada pada pengembangan nalar siswa, bukan membuat mereka tergantung pada teknologi demi hasil cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah.

Lalu menilai pengenalan teknologi tetap diperlukan agar kurikulum pendidikan di Indonesia relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, pihaknya menyambut baik rencana Pemerintah memasukkan materi AI dan coding ke dalam kurikulum. "Nantinya harus tetap berjalan dalam koridor regulasi yang cukup kuat bagi pelajar," ujar Lalu, kemarin.

Ia berharap Pemerintah konsisten menjalankan kebijakan tersebut. Jika penggunaan AI

dibatasi untuk mencegah siswa malas berpikir, di sisi lain Pemerintah perlu menyediakan ruang pembelajaran teknologi AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan, sehingga siswa dapat mempelajari teknologinya secara lebih bertanggung jawab.

Selain itu, Lalu juga mendukung rencana Pemerintah mengembangkan platform AI khusus yang aman digunakan anak-anak. Hal ini sejalan dengan upaya melindungi siswa dari konten negatif yang kini banyak beredar, sekaligus menjaga keamanan data dan privasi anak.

Pihaknya melihat langkah positif telah dimulai melalui peluncuran platform Bijak Cerdas Berdigital oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dapat diakses secara gratis oleh anak, guru, dan orang tua. "Kami berharap platform yang lebih komprehensif terus dikembangkan agar manfaatnya semakin terasa bagi pendidikan," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Senada, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai kebijakan pelarangan penggunaan AI instan bagi pelajar perlu dibarengi dengan pengembangan teknologi pendidikan yang terarah. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menghadirkan platform AI khusus yang aman untuk kebutuhan belajar siswa.

Menurut Hetifah, pembatasan penggunaan AI instan merupakan langkah antisipatif agar proses belajar tidak terganggu oleh kemudahan teknologi. Akses terhadap jawaban instan berpotensi membuat proses belajar menjadi dangkal apabila tidak dikendalikan dengan baik. ■ PYB